BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Reformasi birokrasi Pemerintah daerah merupakan kebutuhan dalamupaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Reformasibirokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta adanya koordinasi, integrasi,sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Sejalan dengan polingan ditetapkannya PP 41 tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah dan guna mendorong tercapainya visi dan misi di bidang aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan dengan Perda No.22 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik serta berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

A. Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Terdapat beberapa isu nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi terhadap kinerja pemerintahan daerah . Masalah kualifikasi aparatur yang belum sesuai dengan kebutuhan, pelayanan publik yang kurang optimal ,opini masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah ,mental dan disiplin pegawai,jumlah pegawai serta masalah-masalah lainnya yang berpangkal pada kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur .Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut , maka dirumuskan Visi Badan Kepegawaian Daerah yang hendak dicapai dalam periode 2008-2013 adalah :

"Tercapainya Pegawai Negeri Sipil Daerah yang Profesional,Akuntabel dan Amanah tahun 2013"

Penjabaran makna Visi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut :

a. **Profesional** : artinya memiliki wawasan yang luas ,kreatif,inovatif dan dapat memandang ke masa depan,memiliki kompetensi di bidangnya ,memiliki daya saing secara jujur dan sportif serta menjunjung tinggi etika profesi .
b. **Akuntabel :** perwujudan pertanggung jawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dalam rangka pencapaian suatu tujuan melalui suatu media berupa laporan secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya.

c. **Amanah :** Jujur dan terpercaya dalam melaksanakan tugas yang diembannya, memperlihatkan sikap,perilaku dan keteladanan serta menjadi komitmennya

untuk seluruh pegawai.

B. Misi Badan Kepegawaian Daerah

a. Misi pertama , meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur .

Tujuan : Mengembangkan kompetensi dan kinerja Aparatur Sasaran:.

1. Meningkatnya kuantitas aparatur yang berkualifikasi sesuai kebutuhanorganisasi
2. Meningkatnya aparatur yang berbasis kompetensi dan profesional
3. Meningkatnya kinerja aparatur yang akuntabel
4. Terwujudnya penerapan penghasilan berdasarkan kinerja

b. Misi kedua ,meningkatkan sinergitas Manajemen Kepegawaian yang Partisipasif dan Akuntabel

Tujuan :

1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian secara terintegrasi
2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dan sasaran

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dan sasaran

2. Meningkatnya akurasi data sumber daya aparatur melalui pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian
3. Meningkatnya jaringan sistem informasi kepegawaian lingkup Provinsi Jawa Barat

c. Misi ketiga , Meningkatkan Kesejahteraan dan Kedisiplinan Pegawai

Tujuan :

1. Meningkatkan penerapan sistem reward dan punishment dalam pembinaan pegawai
2. Meningkatkan kesejahteraan pegawai

Sasaran :

1 Meningkatnya moral dan etika PNS dalam bekerja

2 Menurunnya jumlah kasus kedisiplinan

3 Meningkatnya kualitas pelayanan pegawai di bidang kesehatan jasmani dan rohani

4 Meningkatnya produktifitas dan kinerja pegawai

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis kepegawaian
b. penyelenggaraan kepegawaian daerah dengan meliputi untuk kesekretariatan, pengadaan dan informasi pegawai, mutasi dan administrasi kepegawaian ,pengembangan karir ,kesejahteraan dan disiplin

c. penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB

d. penyelenggaraan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2 Stuktur Organisasi Pada Badan Kepegawaian Derah (BKD)

Stuktur organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada Povinsi Jawa Barat terdiri dari :

1 Kepala

2 Sekretariat,membawahkan :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Program

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub bagian kepegawaian dan umum

3 Bidang pengadaan dan informasi Kepegawaian ,membawahkan:

d. Sub Bidang Pengadaan dan Formasi Pegawai

e. Sub Bidang Sistem Informasi Kepegawaian

4 Bidang mutasi dan administrasi kepegawaian ,membawahkan:

a. Sub bidang kepangkatan dan pensiun

b. Sub bidang perpindahan dan administrasi kepegawaian

5 Bidang pengembangan karir,membawahkan :

a. Sub bagian kompetensi dan kinerja

b. Sub bagian penempatan dan jabatan

6 Bidang kesejahteraan dan disiplin ,membawahkan :

a. Sub bidang kesejahteraan pegawai

b. Sub bidang disiplin dan penghargaan

2.3 Deskripsi Jabatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut , Badan Kepegawaian Daerah mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

a) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

   Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah

b) Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah

   Sekretariat mempunyai tugas pokok penyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program ,pengelolaan keuangan kepegawaian , dan umum . Sekretariat mempunyai fungsi :

   1. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program badan
   2. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan
   3. Menyelenggarakan pengelolaan urusan perencanaan dan program, keuangan, kepegawaian dan umum
   4. Sekretariat membawahkan :
      a. Sub bagian Perencanaan dan Program
      b. Sub bagian Keuangan
      c. Sub bagian Kepegawaian dan Umum

c) Bidang Mutasi Kepegawaian

Bidang Mutasi dan Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi mutasi dan administrasi kepegawaian . Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Bidang Mutasi dan Administrasi Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis mutasi dan administrasi kepegawaian
2. Penyelenggaraaan pengkajian bahan fasilitasi mutasi dan administrasi kepegawaian
3. Penyelenggaraan fasilitasi bidang mutasi dan administrasi kepegawaian ,yang membawahi :
    a. Bidang Mutasi dan Administrasi
    b. Sub bidang Perpindahan dan Administrasi Kepegawaian

d) Bidang Pengembangan Karier

Bidang Pengembangan Karier mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan karier PNS . Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut , Bidang Pengembangan Karier mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengembangan karier
2. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan karier
3. Penyelenggaraan fasilitasi bidang pengembangan karier

4. Bidang Pengembangan Karir membawahkan :
    a. Sub bidang Kompetensi dan Kinerja
    b. Sub bidang Penempatan Dalam Jabatan.

e) Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian

Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyusun bahan petunjuk teknis pengadaan dan formasi PNSD, kedudukan hukum serta pengelolaan data dan informasi kepegawaian . Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyelenggara pengkajian bahan kebijakan teknis pengadaan dan informasi kepegawaian
2. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pengadaan dan informasi kepegawaian
3. Penyelenggaraan fasilitasi bidang pengadaan dan informasi kepegawaian
4. Bidang Pengadaan dan informasi kepegawaian membawahkan :
    a. Sub bidang Pengadaan dan Formasi Pegawai
    b. Sub bidang Sistem Informasi Kepegawaian

f) Bidang Kesejahteraan dan Disiplin

Bidang Kesejahteraan dan Disiplin mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kesejahteraan dan disiplin. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Kesejahteraan dan Disiplin mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pengkajian bahab kebijakan teknis kesejahteraan dan disiplin
2. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi bidang kesejahteraan dan disiplin
3. Penyelenggaraan fasilitasi bidang kesejahteraan dan disiplin :
    a. Sub bidang Kesejahteraan Pegawai
    b. Sub bidang Disiplin dan Penghargaan

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas , Badan Kepegawaian Daerah dilengkapi dengan personil PNS dan tenaga Honorer sebanyak 156 orang .

2.4 Aspek Dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

A. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1. Penerimaan Praja IPDN tahun 2008
2. Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS yang merupakan bentuk penghargaan kepada para tenaga honorer yang telah mengabdikan dirinyab kepada nusa dan bangsa
3. Penerimaan CPNS dari pelamar umum dimana didasarkan padam formasi kebutuhan pegawai pada lingkup Pemda Provinsi Jawa Barat

B. Program Prestasi

1. Terselenggaranya rekrutmen CPNS dari pelamar umum dan tenaga honorer tanpa ada gejolak dari masyarakat

2. Terlaksananya peningkatan status CPNS menjadi PNS sebanyak 1446 orang dan pengambilan Sumpah dan Janji diikuti oleh 1446 orang
3. Pelaksanaan penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi dalam rangka mengaplikasikan PP nomor 41 tahun 2007
4. Meningkatnya jaringan *scholarship* baik dalam negeri maupun luar negeri
5. Kenaikan pangkat tepat waktu
6. Dibukanya kelas khusus pendidikan D4 Akuntansi Pemerintahan

Sedangkan kegiatan unggulan BKD yakni :

1. Pemberian Uang pembinaan kepada 1160 pensiun
2. Uji terap pengukuran kinerja
3. Pengiriman PNS/CPNS eks tenaga honorer dalam pendidikan gelar ke Universitas baik dalam maupun luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur.